

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA
MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TERHADAP
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KECAMATAN
MAIMUN KOTA MEDAN
(Studi kasus kantor badan penanggulangan bencana daerah)**

SKRIPSI

**OLEH
FRISKA ANDRIANI SIAHAAN
198520049**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA
MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TERHADAP
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KECAMATAN
MAIMUN KOTA MEDAN
(Studi kasus kantor badan penanggulangan bencana daerah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

FRISKA ANDRIANI SIAHAAN

198520049

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maimun Kota Medan (Study Kasus Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Medan)"

Nama : Friska Andriani Siahaan

NPM : 198520049

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui oleh:

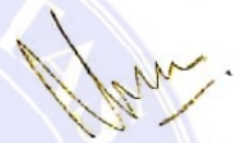
Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Nisa Angelia S.Sos, M.Si

Disetujui

Fa prodi Administrasi Publik



Dr. Wati Kusihafa S.Sos, M.P.P.



Muda.MAP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Februari 2024



Friska Andriani Siahaan
198520049



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Andriani Siahaan
NPM : 198520049
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Maimun Kota Medan (Study Kasus Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Medan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal 02 Februari 2024

Yang menyatakan



Friska Andriani Siahaan

198520049

ABSTRAK

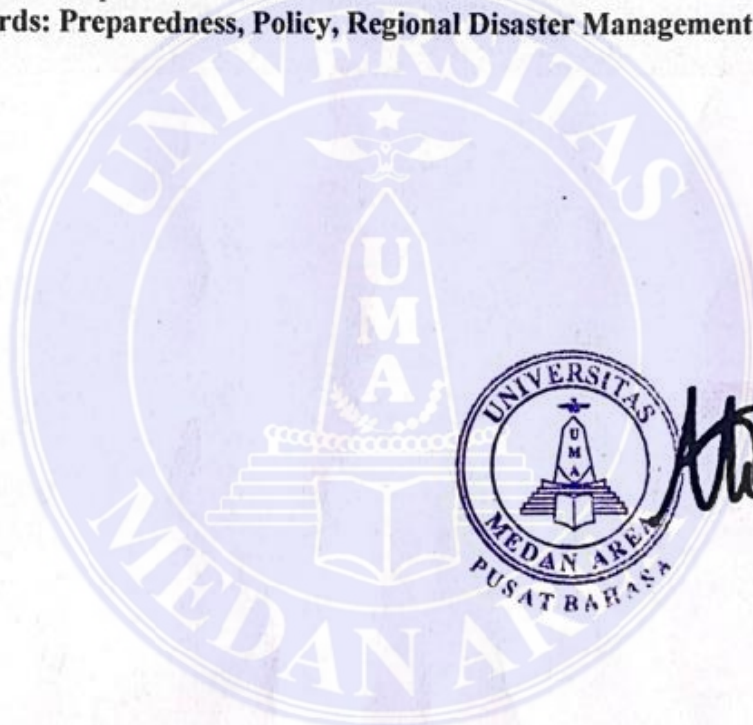
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Mengenai Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir di kecamatan maimun Kota Medan dan mengetahui apa faktor yang menghambat kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang di laksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Medan Kota. Adapun perolehan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pihak badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota medan dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung. Analisis data adalah analisis data deskriptif guna memberi gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya memberi penjelasan, uraian dan gambaran sesuai dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir di kota medan pada dasarnya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan perwali nomor 2 tahun 2018 tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi seperti kurangnya tenaga SDM dalam melakukan pertolongan dan begitu juga pada warga yang tidak ingin meninggalkan rumahnya ketika banjir sedang terjadi sehingga kesiapsiagaan yang dilakukan ketika bencana banjir kurang efektif.

Kata kunci : Kesiapsiagaan, Kebijakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRACT

The purpose of writing this thesis to find out the Implementation of Medan Mayor's Policy Number 2 of 2018 Regarding Flood Preparedness in Medan City and find out factors hindering the policy. This research uses qualitative research methods carried out the Medan City Regional Disaster Management Agency (BPBD). The acquisition of primary data was carried out through interviews with Medan city regional disaster management agency (BPBD) and secondary data obtained from several literatures, laws and regulations. Results this study are flood disaster preparedness in city Medan has basically been carried out accordance the provisions of Perwali number 2 of 2018.

Keywords: Preparedness, Policy, Regional Disaster Management Agency



[Signature] 21/02-2024

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di kota Bandung pada tanggal 29 Juni 2001 dari ayah Elvis Marojahan Siahaan dan ibu Romauli Sigalingging. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pada SDS Parulian Berkat Medan lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke SMP Negeri 15 Medan melanjutkan sekolah di SMK Negeri 7 Medan dan lulus pada tahun 2019. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Administrasi Publik Universitas Medan Area pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kampus dan aktif sebagai bagian dari Bendahara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan berakhir pada tahun 2020. Penulis juga mendapat beasiswa generasi Bank Indonesia (GENBI) dan aktif dalam kegiatan tersebut. Penulis melaksanakan penelitiannya pada tahun 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perwali Nomor 2 Tahun 2018 terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir Kota Medan."

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TERHADAP KESIAPSIAGAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MAIMUN KOTA MEDAN (STUDY KASUS KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA MEDAN)”. Proposal ini untuk memenuhi salah satu syarat mengajukan seminar proposal pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Proposal ini tidak dapat terselesaikan dan tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dan pembuatannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang Terhormat bapak Dr. Selamat Riadi.SE.M.I.Kom Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Yang Terhormat bapak Drs.Indra Muda.MAP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
4. Yang Terhormat Bapak Dr.Budi Hartono ,M.Si sebagai Dosen Pembimbing I Yang Telah Banyak Memberikan Arahan Dan Bimbingan Kepada Penulis

5. Yang Terhormat Ibu Nina Angelia S.Sos, M.Si Sebagai Dosen pembimbing II Penulis.
6. Yang Terhormat Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP Selaku Dosen Sekretaris Penulis.
7. Yang Terhormat Seluruh Bapak/Ibu Dosen Dan Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Ayah Dan Ibu Sebagai Orang Tua Penulis Yang Sangat Luar Biasa Yang Selalu Memberikan Dukungan Serta Doa Dan Motivasi Untuk Tidak Berputusasa Dalam Mengerjakan Proposal Ini.
9. Pihak Tempat Penelitian Yang Telah Memberi Kesempatan Kepada Penulis Untuk Dapat Melakukan Penelitian.
10. Kepada Teman-Teman Saya Kak Indah, Dwina, Lala, Vesi Dan Yogi Marthin Tampubolon Yang Ikut Serta Membantu Dan Mendukung Dalam Menyusun Proposal Ini.

Serta Pihak Yang Telah Membantu Selama Penelitian Dan Penyusunan Skripsi Ini Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu. Penulis Berharap Semoga Proposal Atau Skripsi Ini Bermanfaat Bagi Semua Pihak

Medan, 2 Februari 2024

Hormat Saya

Friska

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Peneliti	8
1.4 Manfaat Peneliti	8
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Implementasi	10
2.1.1 Pengertian implementasi	10
2.1.2 Tahap-tahap Implementasi	13
2.1.3 Aspek dalam Implementasi	14
2.2 Kebijakan Publik	17
2.3 Implementasi kebijakan	19
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulam Data	27
3.4 Teknik Analisis Data	29
3.5 Narasumber	29
3.6 Definisi Konsep dan Operasional	30
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun.....	43
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota medan.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bencana Banjir Di Kota Medan	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Data Umum Kecamatan Medan Maimun	40
Tabel 4.2 Data Kelurahan Kecamatan Medan Maimun.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman wawancara.....	74
Lampiran II	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Terdapat dalam Pasal 18, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPBD).

Adapun dalam Peraturan Walikota Kota Medan tersebut menyebutkan bahwa dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi

fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Medan, pada Peraturan Walikota (Perwal) ini menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui pencegahan dan mitigasi atau penyelesaian masalah. Pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Medan yang menaungi masalah penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melaksanakan wawancara bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ditandai dengan pemantauan rutin dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan resiko bencana, pemetaan lokasi rawan bencana dan pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan pemantauan rutin dapat berdampak tercegahnya terjadi bencana banjir karena dengan adanya pemantauan ke lokasi rawan bencana dengan rutin sehingga dapat mengurangi resiko bencana banjir. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dengan cara menjaga pos pemantauan oleh satuan tugas (satgas) BPBD dan dengan cara melakukan pengecekan ke kawasan rawan bencana. Namun pada kenyataannya pihak pelaksana penanggulangan dalam mengimplementasikannya tidak berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini bahwa bencana yang diteliti ialah

bencana banjir maka dari itu dalam penelitian ini bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan merupakan penanggulangan bencana terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Kota Medan.

Permasalahan mengenai bencana banjir sering juga terjadi di wilayah kota Medan. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Medan dan prinsip-prinsip dalam menangani atau menanggulangi bencana banjir. Implementasi kebijakan mengenai kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir melalui badan penanggulangan bencana daerah khususnya pada kecamatan Maimun Di Kota Medan pada hakikatnya telah berjalan dan terlaksana sesuai dengan perwali nomor 2 tahun 2018,serta untuk mempermudah terlaksananya kebijakan tersebut badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) pada saat ini telah bekerja sama pada komunitas-komunitas relawan yang ikut serta juga membantu,komunitas yang berkolaborasi sebagai relawan seperti Palang Merah Indonesia (PMI),dan berbagai komunitas lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dibentuknya Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penanggulanagan bencana secara menyeluruh. Yang dimana menjadi faktor perubahan dari pendekatan konvensional menjadi tanggap darurat menuju prespektif baru. Yang mana ini lebih ditekankan pada seluruh aspek

penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko bencana. Dimana berdasarkan Permendagri No 46 Tahun 2008, keputusan Presiden No 41 tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB merujuk pada beberapa aspek yaitu : Kesiap siagaan,Tanggap darurat,Rehabilitasi dan rekontruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Karena kurangnya informasi tentang potensi bencana yang ada di daerah-daerah maka sering terjadi bencana tiba-tiba tanpa diketahui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera utara, sehingga keterlambatan dalam pencegahan dan menimbulkan kerugian seperti korban jiwa, kerugian materi dan lain-lain, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi masyarakat dengan BPBD Kabupaten maupun Provinsi. Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan bencana pada Undang-Undang tersebut adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, maka tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, serta berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Dalam rentang 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tercatat lebih dari 4.000 – 5.000 kasus bencana banjir yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Adapun bencana banjir yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 516 kasus dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.271 kasus. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB).

Salah satu provinsi yang terdampak banjir di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Terhitung pada tahun 2020 di 4 (empat)

kecamatan Sebanyak 5.965 jiwa terdampak banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Denai. 4 (empat) kecamatan yang terdampak banjir tersebut diantaranya adalah Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Menurut Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan terdapat 6 (enam) orang hilang dan 1.983 unit rumah terendam. Berdasarkan analisis melalui InaRISK, Kota Medan merupakan salah satu wilayah dengan potensi bahaya banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi dengan 21 kecamatan yang berpotensi terdampak bahaya.

Tabel 1.1 Jumlah bencana banjir di Kota Medan

No	Kecamatan	Jumlah bencana banjir		
		2019	2020	2021
1	Medan tuntungan			1
2	Medan johor	3	3	2
3	Medan amplas		1	3
4	Medan denai			
5	Medan area			
6	Medan kota			
7	Medan maimun	6	5	6
8	Medan polonia		1	
9	Medan baru		2	2
10	Medan selayang	2		
11	Medan sunggal	2	5	3
12	Medan helvetia	5		2
13	Medan petisah	6	1	5
14	Medan barat	1		
15	Medan timur			
16	Medan perjuangan			

17	Medan tembung			
18	Medan deli	1	3	3
19	Medan labuhan	2	4	1
20	Medanm Marelan	1		
21	Medan belawan			
Total		29	25	28

sumber : bps kota medan tahun 2022

Berdasarkan data pada gambar 1.1 tersebut jumlah bencana banjir yang terkecil berada pada tahun 2020 yakni sebanyak 25 kali dalam setahun kemudian daerah paling sering terdampak banjir di daerah medan tunggal yakni sebanyak 5 kali dan medan maimunn sebanyak 5 kali dalam setahun, sementara jumlah bencana banjir terbesar berada pada tahun 2019 yang terjadi sebanyak 29 kali dalam setahun dan daerah yang sering terdampak banjir medan maimun juga medan petisah yang sama berjumlah 6 kali dalam satu tahun. yang di sebabkan oleh banjir terjadi juga dipicu cuaca ekstrem dan tingginya intensitas hujan di hulu sungai yang bermuara ke Kota Medan. "Kondisi itu menyebabkan kawasan yang dilintasi sungai menjadi banjir kemudian dikarenakan sampah masyarakat dan pembangunan rumah penduduk yang drainasinya tidak dibangun secara baik dan sejalur.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 2 TAHUN 2018 TERHADAP KESIAPSIAGAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MAIMUN KOTA MEDAN (STUDY KASUS KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA MEDAN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik

meneliti bagaimana implemetasi kebijakan BPBD terhadap peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018 tentang penanggulangan banjir di kota Medan. Penulis nantinya dapat memberikan masukan dan saran agar BPBD Kota Medan lebih maju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam kesiapsiagaan BPBD menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Maimun Kota Medan ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan perwali no.2 tahun 2018 tentang kesiapsiagaan ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam kesiapsiagaan BPBD menanggulangi Bencana Banjir Di kota medan
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan perwali no.2 tahun 2018 tentang kesiapsiagaan di kecamatan Medan Maimun kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal pembinaan pengelolaan perparkiran.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya

1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di jurusan Administrasi publik Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Medan Area.

1.4.2 Secara praktis

Secara praktis, bagi penulis berguna sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan di lapangan. dalam hal ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang secara serius dalam mengamati perwali no.2 tahun 2018 tentang kesiapsiagaan di kecamatan medan maimun kota medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang akan dikerjakan terhadap orang lain. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. (Mulyadi 2015). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan pengadilan lainnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai

dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
(Mazmanian, Sabatier, Waluyo, 2016)

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program. Secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat.

Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah

ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, Karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat:

- (1) Kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus,
- (2) Dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang

akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Abdul Wahab (2012:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Abdul Wahab 2012). Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.1.2 Tahap-tahap implementasi

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam proses implementasi, agar pengimplementasian kualitas pelayanan publik dapat terealisasi dengan baik, Edward III menegaskan bahwa ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi ini adalah tahapan penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional, hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian adalah tahap adalah tahap pengaturan dan penetapan

beberapa komponen pelaksanaan kebijakan seperti, lembaga pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen kebijakan.

c. Tahapan Aplikasi

Tahapan aplikasi ini adalah tahapan penerapan rencana implementasi pelayanan publik ke kelompok target atau sarana yang akan ditinjau seperti masyarakat.

2.1.3 Aspek Dalam Implementasi

Agar dapat terimplemetasi dengan baik yang menjadi tujuan seperti yang telah dirumuskan, maka keberhasilan implementasi itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, menurut Charles O. Jones (1996:296) mengemukakan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam berbagai level, misalnya undang-undang peraturan pemerintah, keputusan dari presiden atau peraturan daerah.
- b. Pelaksana dalam sebuah kebijakan atau keputusan tersebut harus oleh instansi itu sendiri.
- c. Kesiadaan dari masyarakat untuk kepentingan atau kelompok target dalam melaksanakan keputusan dan kebijakan tersebut.
- d. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan dalam dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negative
- e. Presepsi instansi pelaksana, atas pelaksanaan sebuah kebijakan
- f. Upaya perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan

b. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan

diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

C. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung padasifatnya yang positif atau negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. mplementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan "*policy delivery system*" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan

output atau outcomes tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian *outcome*-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.”

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, *energy*, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (Dunn 2017). Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2017)

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. (Mulyadi 2015) Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di publik maupun pemerintah. (Tahir, 2014). Ciri adalah keterangan yang

menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Setiap orang atau benda pasti mempunyai ciri tersendiri. Begitu juga dengan kebijakan yang mempunyai ciri tersendiri. Anderson dalam Zainal Abidin (2002:41) mengatakan ada beberapa hal yang menandakan ciri dari sebuah kebijakan, yaitu:

1. Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan membuatnya.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Adapun yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban umum.
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal.
3. Memadukan berbagai aktivitas.
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material.

2.3 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan 'implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.” Nugroho, (2003:158) mengatakan bahwa: Dalam mengimplementasikan kebijakan, menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Joko Pramono, (2020:2) mengatakan bahwa: Prinsip implementasi kebijakan juga termaksud cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Penerapan atau implementasi kebijakan memiliki upaya yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara maksimal dan efisien, agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam program aksi dan berbagai kegiatan. Pencapaian program jelas dan terukur maka implementasi Kebijakan perlu disusun indikator keberhasilan program atau proyek, kebijakan dikatakan berhasil apabila tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan (Suparno, 2017:25).

Edwards III mengemukakan implementasi diperlukan karena adanya pedoman tentang sebuah masalah yang perlu ditangani dan dipecahkan. Edwards III (dalam Widodo 2010:96) mengatakan bahwa, untuk mengatasi masalah implementasi menanyakan faktor apa yang mendukung dan mencegah

keberhasilan implementasi, ada empat faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan.

Komunikasi merupakan variable (data) yang paling penting di dalam mempengaruhi implementasi kebijakan karena komunikasi menentukan tujuan dari sebuah masalah, dengan adanya komunikasi informasi yang disampaikan lebih jelas dan akurat.

2. Sumber daya Sumber daya dapat diukur dari kualitas kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. indikator sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi terdiri dari staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh pegawai yang kurang kompeten dalam bidangnya. Informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan mengenai data, serta wewenang dan fasilitas sebagai penunjang implementasi kebijakan akan berhasil.

3. Disposisi Menekankan adanya karakteristik yang era tantara implementor kebijakan atau program karakter yang paling utama dimiliki oleh pelaksana adalah kejujuran dan tujuan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang berpengaruh positif atau adanya dorongan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar, implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula sebaliknya jika para pelaksana bersikap acuh atau negative maka kebijakan akan mengalami masalah yang serius.

4. Struktur birokrasi Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling sering

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting diantara, yaitu: mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standar Operating Procedure (SOP)*. Struktur pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan secara tepat. Grindle, (1980:7) mengatakan bahwa, “keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditunjang oleh suatu variabel /program penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan, bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diantaranya adalah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri.”

2.4. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, judul, tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	M.Rais Sahdat Maulana, (Implementasi peraturan walikota medan no 2 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kota medan, Tahun 2022)	Kualitatif	Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi kebijakan terutama yang dilakukan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sudah berjalan dengan baik yaitu dengan terus melakukan sosialisasi – sosialisasi dan kegiatan – kegiatan dalam upaya untuk memberikan pemahaman atas potensi – potensi bencana agar nantinya dapat mengambil langkah awal ketika terjadinya bencana.
2.	M. Reza Pahlevi, (Implementasi peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja penanggulangan bencana banjir dikota medan, Tahun 2021)	Kualitatif	Dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh BPBD sudahlah baik dikarenakan acuan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018. Koordinasi kepada pihak- pihak sosial lainnya sudah berjalan dengan baik tetapi tidak efektif dikarenakan komunikasi diantara pihak pemerintah dan masyarakat masih minim.

3.	Muhammad Berkah Simatupang, (Implementasi peraturan walikota medan no 2 tahun 2018 dalam menanggulangi bencana banjir dikota medan ditinjau dari siyasah syar'iah, Tahun2021)	Kualitatif	Dapat di lihat bahwa kebijakan pemerintah Kota Medan tersebut telah sesuai dengan siyasah syar'iyah karena peraturan tersebut dapat memberikan akibat positif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dengan demi kian seperti instanti terkait lebih dekat dan menjalankankomunikasi dengan baik.
----	---	------------	--

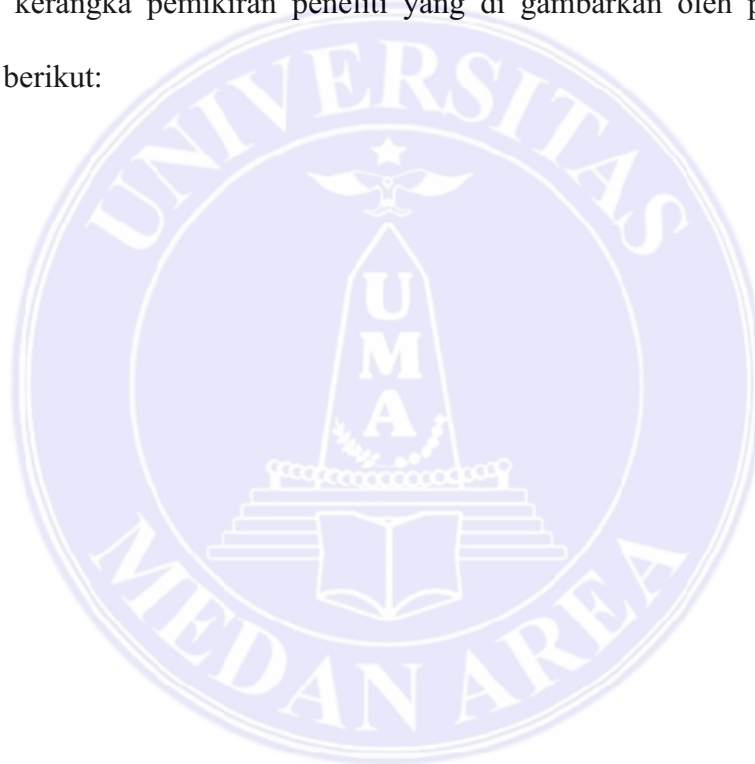
2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran berupa konsep yang mana didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam kerangka berpikir adanya hubungan teori dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai permasalahan topik penelitian. Menurut Syamsul Arifin dalam (Simanjuntak, 2017) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dengan adanya kerangka berpikir akan mempermudah dalam memahami isi dari suatu penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini kerangka berpikir/kerangka pemikiran dapat memberikan manfaat sebagai dasar rumusan hipotesis, adanya hubungan yang ditunjukkan dengan tanda panah, dan dalam kerangka berpikir menjelaskan tentang hal-hal yang berhubunga dengan variabel pokok sub variabel pokok/ pokok masalah yang ada dalam penelitian maka dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai implementasi kebijakan Perwali no.2 tahun 2018 mengenai kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir kecamatan Medan Maimun di Kota Medan, penulis mengambil teori dari George C.Edward III mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan

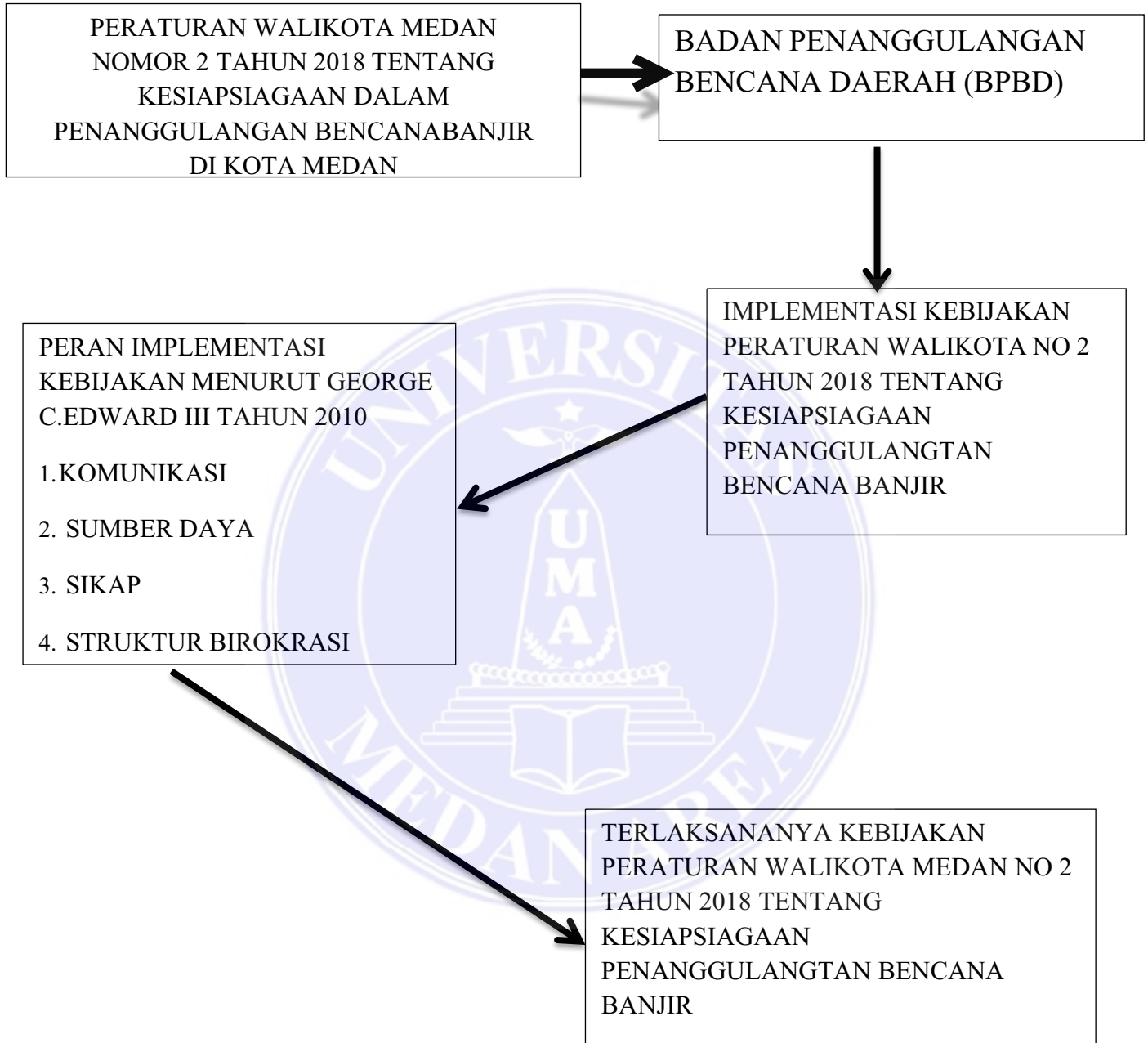
kebijakan publik tidak akan terwujud. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi dan
4. Struktur birokrasi

Adapun kerangka pemikiran peneliti yang di gambarkan oleh peenulis adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Penelitian Deskriptif adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain. (Moleong, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di kompleks PIK Menteng, Jl Rahmad No 1, Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatra Utara Dengan rentang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai selesai

3.1 Tabel Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jan 2023	Feb 2023	Maret 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agst 2023	Sep 2023	Feb 2024
1	Peyusunan Proposal										
2	Bimbingan Proposal										
3	Seminar Proposal										
5	Perbaikan Proposal										
6	Penelitian										
7	Penyusunan Skripsi										
8	Seminar Hasil										
9	Perbaikan Skripsi										
10	Sidang Meja Hijau										

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:456) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2018) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3) Display Data

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4) Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

3.5 Narasumber/Informan

Menurut Moleong (2006:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

"Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data tentunya pada penelitian ini terdapat informan/narasumber yang terbagi menjadi 3 yaitu: informan utama, informan kunci, dan informan tambahan.

1. Informan kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama : Fahrudin, Sh, M.Ap

Jabatan : Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan

2. Informan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama : Erika Sari Siregar, Se

Jabatan : Kepala subbagian umum

3. Informan tambahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama : Sovi Analisa

Ahmad Sofyan Saragih

Asrida Gusna Namora Siregar

Nico Lery Sone Aruan

Ricky Hadi Putra

Jabatan : Phl Bpbd Kota Medan

Masyarakat : Ucok Dermawan

Masyarakat : Nanang

Masyarakat : Juwita Sinaga

Masyarakat : Romauli Sigalingging

Masyarakat : Berman Hutagalung

3.6 Definisi konsep dan operasional

1. Definisi konsep.

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

b. Perwali No.2 Tahun 2018

Peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka penanggulangan bencana daerah adalah untuk meningkatkan penanganan atau penanggulangan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dengan penanganan badan penanggulangan bencana yang ada di Kota Medan khususnya banjir dengan penetapan pedoman dan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan juga rekontruksi secara adil dan setara yang dipimpin oleh kepala pelaksana Intansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

c. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

d. Penanggulangan bencana banjir

Melakukan reboisasi tanaman khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuar lahan hijau untuk penyerapan air. Berhenti membangun perumahan di tepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai.

2. Definisi Operasional

a. Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku

kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Implementasi Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III 18 (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak- pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa factor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Disamping program tidak bias dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi

lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan

kebijakan yang menjadi kewenangan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan

para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur

birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

c. *Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*

”*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, *system* dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di badan penanggulangan bencana daerah kota medan dengan menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme dalam menjalankan penanggulangan bencana banjir pentingnya mengkaji bencana, kerangka berfikir dalam mengelola dan menanggapi bencana lebih sering di lakukan pasaca bencana dimana bencana sudah terlanjur menimbulkan kerugian masyarakat. Pemerintah harus cepat untuk memberikan bantuan kepada para korban, upaya di lakukan di berikannya kebijakan yaitu program pengurangan risiko bencana (PRB) pelaksanaan ini di lakukannya sebelum terjadinya bencana, dan masyarakat dapat melihat dampaknya langsung.
2. Kendala yang dialami BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Medan yaitu, sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Medan saat ini belum sesuai dengan bidang ilmu dan kecakapan yang dimiliki, sehingga akan menimbulkan kendala atau hambatan untuk melakukan tugas-tugas kebencanaan. Hal ini dikarenakan dalam mendukung kualitas sumber daya manusia pada BPBD Kota Medan dilakukan pendidikan dan pelatihan dari internal birokrasi, guna meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas. Hal ini membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Medan untuk dapat menambah kekurangan sarana dan prasarana sehingga dapat terpenuhi.

5.2 Saran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menangani banjir di Kota Medan diharapkan dapat lebih maksimal. Dalam hal ini dapat dimulai memberikan sosialisasi dan inovasi-inovasi baru, sehingga masyarakat lebih merasakan dampak positif dari adanya badan penanggulangan bencana daerah kota medan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebaiknya mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawainya dalam hal pemahaman mengenai manajemen bencana dan diboboti sesuai bidangnya masing-masing agar benar - benar memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini diperlukan agar langkah-langkah yang dilakukandankeputusan yang diambil benar-benar dimengerti secara keilmuan sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan juga diharapkan dapat membangun koordinasi dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Medan dengan meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan unsur pengarah lainnya sehingga mempermudah koordinasi dalam penanganan banjir, tidak ada program kerja yang tumpang tindih dan setiap instansi menganggap keberadaan instansi yang lainnya. Sehingga pada akhirnya upaya penanggulangan bencana banjir pun terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Wahab, S., & Marikar, F. (2012). *The environmental impact of gold mines: pollution by heavy metals. Open engineering, 2(2), 304-313*
- gustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). *Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik. Jurnal Ilmu Politik, Edisi, 21, 2010.*
- Dunn, William N. "Pengantar kebijakan publik." (2013).
- Jaswadi, R. R., & Hadi, P. (2012). *Tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko banjir di kecamatan pasarkliwon Kota Surakarta. Majalah Geografi Indonesia, 26(1), 119-48.*
- Mulyadi, E. (2022). *Analisis Isi Pesan Instagram Bpbd Dki Jakarta Dalam Mitigasi Bencana Banjir Memakai Model Cerc. Journal Signal, 10(2), 220-233.*
- Maulana, M. (2022). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (Doctoral Dissertation).*
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- N., Mulyadi, M., & Septiarti, S. W. (2015). *Analisis implementasi pendidikan berbasis budaya pada lembaga pendidikan nonformal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan.*
- Pahlepi, M. Reza. *Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan. Diss. 2021.*
- Rohmah, M. (2022). *Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang mobilitas masyarakat di masa PPKM: studi kasus Pasar Ampel dan Galaxy Mall Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).*
- Rasyid, M., Surachman, S., & Sugiono, S. (2016). *Analisis Perbaikan Work Station Pada Proses Produksi Garment Dengan Menggunakan Pendekatan Environment Ergonomic. Journal of Engineering and Management in Industrial System, 4(2), 121-12*
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71746/perwali-kota-medan-no-2-tahun-2018>
<https://bpbd.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read35/Struktur-Organisasi.html>
<http://repository.uinsu.ac.id/13381/>

*<https://bpbd.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read16/Tugas-dan-Fungsi.htm>
Subekti, Mening, Muslih Faozanudin, and Ali Rokhman. "Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3.2 (2017): 58-71.*



LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman wawancara

Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi yang terbangun antara bpbd kepada masyarakat juga relawan banjir apakah sudah berjalan dengan baik?
2. Pada saat sedang bertugas apakah bpbd sudah melakukan breffing terlebih dahulu?
3. Bagaimana hubungan komunikasi yang terjalin pada pegawai bpbd dengan bnpb apakah berjalan dengan baik?

Sumberdaya

1. Apakah sumberdaya manusia yang dimiliki bpbd pada saat ini masih mencukupi?
2. Bagaimana dengan sumberdaya anggaran bpbd apakah tercukupi dan untuk apa anggaran tersebut dikeluarkan?
3. Adakah kendala bpbd dalam sumberdaya anggaran ataupun manusia?

Birokrasi

1. Bagaimana sop yang ada pada bpbd?
2. Apakah sop bpbd sudah berjalan dengan baik?
3. Apakah pegawai bpbd sudah paham akan sop yang ada?

Disposisi

1. Apakah sikap para pegawai bpbd sudah melakukan tugasnya dengan baik?
2. Dalam mensosialisasikan waspada pada banjir dilakukan oleh bidang apa?
3. Apakah bpbd telah menerapkan jenjang karir bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik?

Lampiran II



**Kantor Kesiapsiagaan
Bersama Bpk. Fahrudin S.H,M.AP**



**Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
Bersama Bpk. Ronald ferdy, Abdur Rahman, fredy sihotang**



Kantor BPBD Kota Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 957/FIS.2/01.10/VI/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

08 Juni 2023

Yth,
Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA)
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Friska Andriani Siahaan
N P M : 198520049
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan(BPDB), dengan judul Skripsi *"Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Medan"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan - 20228
Telp : 061 - 7882200, Fax : 061 - 7850800
Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbd.pemkomedan.go.id

Medan, 12 Agustus 2023

Nomor : 000.9/2396
Lampiran : -
Perihal : Selesai Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -

Medan

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0861 tanggal 09 Juni 2023 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 857/FIS.2/01.10/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 perihal Surat Keterangan Riset, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Friska Andriani Siahaan
NIM : 198520049
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : "Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Medan"

Telah selesai melaksanakan riset sejak tanggal 12 Juni s/d 02 Agustus 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



INDRA GUNAWAN, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19680911 199002 1 001



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 857/F.S.2/01.10/VI/2023
Lamp :-
Hal : Pengambilan Data/Riset

08 Juni 2023

Yth,
Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA)
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Friska Andriani Siahaan
N P M : 198520049
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPDB), dengan judul Skripsi *"Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Medan"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

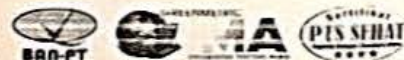
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Fatmati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File.- 1







Wawancara dengan pak Bayu Nainggolan (anggota bpbd)



Wawancara dengan ibu Erika Sari Siregar, Se (Kepala subbagian umum)